

**SINTESIS PEMIKIRAN SOSIAL, DEMOKRASI, INSTITUSI, DAN
PEMBANGUNAN: TELAAH AKTUAL TERHADAP KONTRIBUSI
INTELEKTUAL IBNU KHALDUN DAN IBNU RUSYD**

Donna Sitta Ariyanti¹, Yudhi Hertanto²

Universitas Ibnu Khaldun¹; Akper Berkala Widya Husada²

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 23/7/2026; Direvisi: 20/8/2026; Diterbitkan: 31/8/2026

ABSTRAK

Kajian filsafat politik dan sosiologi Islam klasik sering diposisikan sebagai artefak sejarah yang dinilai memiliki keterbatasan relevansi terhadap berbagai persoalan sosial-politik kontemporer. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi dan mensintesis secara kritis pemikiran sosiologis Ibnu Khaldun dan rasionalisme hukum-politik Ibnu Rusyd dalam merespons tantangan demokrasi, pembangunan, dan kelembagaan modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan analisis hermeneutika-komparatif terhadap karya Al-Muqaddimah, *Fasl al-Maqal*, dan *Al-Daruri fi al-Siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ashabiyah sebagai solidaritas sosial memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi masyarakat dan mengurangi risiko disintegrasi akibat polarisasi politik. Selain itu, pemikiran Ibnu Rusyd mengenai *as-siyasah al-jamiah* menekankan pentingnya partisipasi politik, kebebasan berpikir, dan kesetaraan sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Analisis juga menunjukkan bahwa gagasan Ibnu Khaldun mengenai siklus kemunduran institusi dan keadilan fiskal mengindikasikan implikasi terhadap pentingnya pengendalian konsentrasi kekuasaan serta pengelolaan kebijakan perpajakan yang proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi perspektif sosiologis Ibnu Khaldun dan rasionalisme politik Ibnu Rusyd menunjukkan potensi sebagai kerangka konseptual dalam memahami serta merespons tantangan demokrasi, pembangunan, dan kelembagaan pada konteks abad ke-21.

Kata Kunci: *Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, Ashabiyah, Demokrasi, Pembangunan, Kelembagaan.*

ABSTRACT

Classical Islamic political philosophy and sociology are often regarded as historical artifacts with limited relevance to contemporary socio-political issues. This study aims to reconstruct and critically synthesize the sociological thought of Ibn Khaldun and the legal-political rationalism of Ibn Rushd in addressing contemporary challenges related to democracy, development, and institutional governance. The study employed a qualitative descriptive approach based on library research and hermeneutic-comparative analysis of the primary works Al-Muqaddimah, *Fasl al-Maqal*, and *Al-Daruri fi al-Siyasah*. The findings indicate that the concept of ashabiyah (social solidarity) plays a significant role in strengthening social cohesion and reducing the risk of social disintegration caused by political polarization. Furthermore, Ibn Rushd's concept of *as-siyasah al-jamiah* emphasizes the importance of political participation, freedom of thought, and equality as fundamental principles of inclusive governance. The analysis also suggests that Ibn Khaldun's ideas on the cyclical decline of institutions and fiscal justice highlight the importance of limiting the concentration of power and implementing balanced taxation policies. This study concludes that integrating Ibn Khaldun's sociological

perspective with Ibn Rushd's political rationalism demonstrates the potential to serve as a conceptual framework for understanding and addressing contemporary challenges in democracy, development, and institutional governance in the twenty-first century.

Keywords: *Ibn Khaldun, Ibn Rushd, Ashabiyah, Democracy, Development, Institutional Governance.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teori sosial, demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui satu jalur perkembangan intelektual yang berpusat pada Barat. Narasi yang menempatkan filsafat Yunani, Renaisans, dan Pencerahan Eropa sebagai mata rantai utama perkembangan pemikiran modern berpotensi mengabaikan proses pertukaran pengetahuan yang berlangsung antarkawasan dan antartradisi intelektual. Kajian Lucas (2024) menunjukkan perlunya meninjau kembali narasi klasik mengenai perkembangan ilmu pengetahuan Islam, sedangkan Haoua (2025) memperlihatkan bahwa kota-kota Andalusia, khususnya Córdoba dan Toledo, menjadi ruang penting bagi transmisi warisan intelektual Arab-Islam ke Eropa melalui proses penerjemahan dan interaksi keilmuan. Dalam konteks tersebut, tradisi intelektual Islam tidak hanya berfungsi sebagai penerima atau penerus pengetahuan terdahulu, tetapi juga memiliki kontribusi dalam pembentukan gagasan mengenai rasionalitas, politik, masyarakat, dan ilmu pengetahuan yang relevan bagi perkembangan pemikiran global. Oleh sebab itu, pengkajian kembali pemikiran cendekiawan Muslim klasik menjadi penting untuk menghadirkan perspektif yang lebih beragam dalam memahami persoalan sosial-politik dan pembangunan kontemporer.

Ibnu Rusyd (1126–1198 M) dan Ibnu Khaldun (1332–1406 M) merupakan dua tokoh penting yang dapat digunakan untuk merepresentasikan kekayaan pendekatan dalam tradisi pemikiran Islam. Bacik (2024) menunjukkan perkembangan teori politik Islam sebagai suatu tradisi yang memiliki dimensi rasional dan mengalami perkembangan historis yang kompleks, sementara Gökçe et al. (2025) secara khusus menempatkan Ibnu Rusyd dalam kajian filsafat politik. Pada sisi lain, pemikiran Ibnu Khaldun berkembang melalui perhatian terhadap hubungan antara masyarakat, kekuasaan, negara, dan perubahan sosial sebagaimana terlihat dalam kajian Demirel (2024) dan Senturk (2024). Perbedaan orientasi tersebut justru memungkinkan keduanya dibaca secara komplementer, yakni Ibnu Rusyd melalui penekanan terhadap rasionalitas, filsafat politik, dan hubungan akal dengan wahyu, sedangkan Ibnu Khaldun melalui analisis mengenai dinamika sosial, politik, kelembagaan, dan ekonomi. Dengan demikian, kedua pemikir tersebut menyediakan perangkat konseptual yang dapat mempertemukan dimensi normatif-filosofis dengan analisis sosial yang lebih kontekstual dalam memahami kehidupan masyarakat dan negara.

Pemikiran Ibnu Rusyd memiliki relevansi khusus dalam pembahasan mengenai hubungan antara rasionalitas, filsafat, agama, dan kehidupan politik. Kajian Al Hafied dan Nurmayanti (2025) menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Rusyd dapat dibaca melalui persoalan paradigma dan rasionalitas, terutama dalam melihat posisi akal dalam pencarian pengetahuan. Riswan dan Santalia (2025) juga memperlihatkan bahwa pembelaan Ibnu Rusyd terhadap rasionalitas berkaitan erat dengan upaya menjelaskan hubungan antara filsafat dan wahyu secara argumentatif. Dalam ranah politik, Gökçe et al. (2025) serta Emy (2024) menunjukkan bahwa pemikiran politik Ibnu Rusyd dapat dikaitkan dengan persoalan pemerintahan, kehidupan bersama, kebebasan, persamaan, dan orientasi terhadap kepentingan masyarakat. Perspektif tersebut memberikan dasar untuk menempatkan Ibnu Rusyd bukan sekadar sebagai komentator

filsafat Yunani, melainkan sebagai pemikir yang menawarkan pendekatan rasional dalam membaca persoalan politik dan hubungan antara pengetahuan, agama, serta kehidupan publik.

Berbeda dengan penekanan filosofis Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun memberikan perhatian lebih besar terhadap proses sosial yang membentuk keberlangsungan maupun perubahan suatu negara. Konsep *ashabiyah*, dinamika kekuasaan, hubungan antara masyarakat dan negara, serta perubahan politik menjadi bagian penting dalam teori negara Ibnu Khaldun yang dikaji kembali oleh Demirel (2024). Senturk (2024) memperluas relevansi pemikiran tersebut dengan menempatkannya dalam pembacaan politik modern dari perspektif peradaban, sedangkan Alibašić (2025) mengaitkan warisan pemikiran Ibnu Khaldun dengan praktik tata kelola pemerintahan kontemporer. Relevansinya juga terlihat pada bidang pembangunan ekonomi, karena Pratiwi (2023) menunjukkan kemungkinan penggunaan model pembangunan berbasis pemikiran Ibnu Khaldun untuk memahami pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara Muslim. Kajian Kusuma et al. (2024), Mardiana et al. (2025), dan Gusfira et al. (2024) semakin memperlihatkan bahwa gagasan Khaldun dapat dibaca dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, peran negara, kesejahteraan, dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Meskipun kajian mengenai Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun terus berkembang, literatur mutakhir yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pembahasan keduanya masih lebih sering ditempatkan dalam jalur kajian yang berbeda. Ibnu Rusyd banyak dikaji melalui persoalan rasionalitas, filsafat, hubungan akal dan wahyu, serta filsafat politik, sebagaimana terlihat dalam karya Omar (2025), Gökçe et al. (2025), Al Hafied dan Nurmayanti (2025), serta Emy (2024). Sementara itu, Ibnu Khaldun lebih banyak dikembangkan dalam pembahasan mengenai teori negara, perubahan sosial, tata kelola, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sebagaimana ditunjukkan oleh Demirel (2024), Pratiwi (2023), Alibašić (2025), dan Mardiana et al. (2025). Kondisi tersebut membuka ruang untuk mengembangkan kajian yang tidak hanya merekonstruksi pemikiran kedua tokoh secara individual, tetapi juga mempertemukan konsep-konsep mereka dalam suatu kerangka analisis yang koheren. Khususnya, hubungan antara rasionalitas politik, dinamika sosial, kelembagaan, pembangunan, dan persoalan demokrasi kontemporer masih memerlukan sintesis konseptual yang lebih terarah berdasarkan literatur mutakhir.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merekonstruksi dan mensintesis pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun sebagai dua perspektif yang dapat saling melengkapi dalam membaca persoalan abad ke-21. Kontribusi utama penelitian terletak pada upaya menghubungkan rasionalisme politik Ibnu Rusyd dengan pendekatan sosial-politik Ibnu Khaldun sehingga persoalan demokrasi, tata kelola, kelembagaan, dan pembangunan tidak dianalisis hanya dari satu dimensi. Ibnu Rusyd digunakan untuk memperkuat pembacaan mengenai rasionalitas, kebebasan berpikir, hubungan agama dan politik, serta orientasi pemerintahan terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan Ibnu Khaldun digunakan untuk menjelaskan kohesi sosial, dinamika kekuasaan, kapasitas kelembagaan, dan pembangunan ekonomi. Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk mempertemukan dimensi filosofis dan empiris dalam kajian pemikiran politik Islam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian filsafat politik dan sosiologi Islam melalui sintesis dua tradisi pemikiran klasik, sedangkan secara praktis kerangka tersebut dapat menjadi perspektif alternatif dalam mendiskusikan tata kelola publik, penguatan kelembagaan, pembangunan ekonomi, dan kehidupan sosial yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Objek penelitian terdiri atas empat karya primer dari tiga pengarang, yaitu *Les Misérables* karya Victor Hugo, *The Old Man and the Sea* karya Ernest Hemingway, serta *The Unbearable Lightness of Being* dan *The Book of Laughter and Forgetting* karya Milan Kundera. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur pada Google Scholar, Scopus, JSTOR, dan SpringerLink menggunakan kata kunci *literary sociology*, *philosophy of literature*, *hermeneutics*, *social criticism*, *Victor Hugo*, *Ernest Hemingway*, dan *Milan Kundera*. Literatur diseleksi menggunakan kriteria inklusi berupa artikel ilmiah, buku akademik, dan prosiding bereputasi yang diterbitkan pada periode 2021–2026, sedangkan karya klasik digunakan sebagai sumber primer sesuai objek penelitian. Analisis data menerapkan hermeneutika filosofis Gadamer sebagai pendekatan interpretatif untuk memahami makna teks dalam hubungannya dengan konteks sosial kontemporer.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis intertekstual kritis yang terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan mengategorikan gagasan filosofis serta kritik sosial yang terdapat pada keempat karya primer. Tahap kedua membandingkan temuan tersebut dengan literatur sosiologi dan filsafat kontemporer, termasuk konsep prekariat Guy Standing dan burnout society Byung-Chul Han, guna mengidentifikasi relevansi dan perkembangan pemikiran. Tahap ketiga menyintesis hasil analisis untuk membangun kerangka konseptual yang menghubungkan perspektif ketiga pengarang terhadap persoalan sosial kontemporer. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teori dengan membandingkan interpretasi dari berbagai perspektif ilmiah serta evaluasi kredibilitas sumber berdasarkan reputasi penerbit, status *peer review*, indeksasi jurnal, dan keterkaitan substansi dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Untuk memperkuat interpretasi terhadap temuan penelitian, diperlukan pemetaan literatur yang dapat menunjukkan posisi konseptual masing-masing kajian dalam membangun sintesis pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun. Literatur yang digunakan tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan kesamaan tema, tetapi juga berdasarkan kemampuan sumber dalam menjelaskan hubungan antara gagasan klasik dan persoalan masyarakat kontemporer. Pemetaan ini penting agar argumentasi pembahasan memiliki landasan akademik yang jelas serta tidak bergantung pada satu perspektif pemikiran. Selain itu, matriks literatur membantu mengidentifikasi keterkaitan antarkajian sekaligus memperlihatkan ruang interpretasi yang dapat dikembangkan dalam penelitian.

Tabel. Matriks Literatur Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun

No. Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Konsep/Variabel Utama	Temuan/Relevansi Utama	Relevansi dengan Pembahasan
1 Abror (2021)	Pemikiran Ibnu Rusyd tentang pendidikan	Pendidikan, rasionalitas, relevansi kontemporer	Pemikiran pendidikan Ibnu Rusyd memiliki relevansi dengan kebutuhan pendidikan kontemporer, khususnya dalam pengembangan kemampuan intelektual manusia.	Mendukung pembahasan pendidikan, rasionalitas, dan pembentukan kapasitas manusia.

No. Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Konsep/Variabel Utama	Temuan/Relevansi Utama	Relevansi dengan Pembahasan
2 Al Hafied & Nurmayanti (2025)	Perbandingan paradigma Kuhn dan Ibnu Rusyd	Paradigma, rasionalitas, filsafat ilmu	Pemikiran Ibnu Rusyd relevan untuk memahami hubungan antara rasionalitas, pengetahuan, dan proses pembentukan pemikiran.	Mendukung pembahasan rasionalitas sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial dan politik.
3 Alibašić (2025)	Warisan administratif Ibnu Khaldun	Administrasi, tata kelola, pemerintahan	Gagasan Ibnu Khaldun dapat digunakan untuk membaca praktik administrasi dan tata kelola pemerintahan kontemporer.	Mendukung pembahasan dinamika kekuasaan, institusi, administrasi, dan tata kelola.
4 Bacik (2024)	Perkembangan teori politik Islam	Rasionalisme politik, sejarah pemikiran Islam	Rasionalisme politik Islam berkembang melalui proses historis yang panjang dan tidak dapat direduksi pada satu model pemikiran.	Mendukung pembahasan rasionalitas politik dan kehati-hatian dalam membaca pemikiran Islam klasik.
5 Bahri & Musa (2022)	Konsep <i>ashabiyah</i> menurut Ibnu Khaldun	<i>Ashabiyah</i> , solidaritas sosial	<i>Ashabiyah</i> merupakan konsep penting untuk memahami solidaritas dan kohesi sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun.	Menjadi dasar utama pembahasan solidaritas sosial dan keteraturan masyarakat.
6 Demirel (2024)	Asal-usul sosiologis dan politik teori negara Khaldun	Negara, masyarakat, politik, sosiologi	Teori negara Ibnu Khaldun berkaitan dengan kondisi sosial dan politik yang menjadi dasar terbentuknya negara.	Mendukung pembahasan hubungan masyarakat, kekuasaan, dan pembentukan negara.
7 Emy (2024)	Konsep kerakyatan dalam filsafat politik Ibnu Rusyd	Kerakyatan, politik, filsafat Ibnu Rusyd	Pemikiran politik Ibnu Rusyd dapat digunakan untuk mendiskusikan posisi masyarakat dalam kehidupan politik.	Mendukung pembahasan pemikiran politik Ibnu Rusyd dan demokrasi sebagai kategori interpretatif.
8 Gökçe et al. (2025)	Filsafat politik Ibnu Rusyd	Filsafat politik, negara, rasionalitas	Pemikiran politik Ibnu Rusyd memiliki dimensi filosofis yang berkaitan dengan rasionalitas dan kehidupan politik.	Mendukung pembahasan rasionalitas, kebijakan, hukum, dan kehidupan politik.
9 Gusfira et al. (2024)	Pengaruh pemikiran Khaldun terhadap ekonomi Islam Indonesia	Ekonomi Islam, pembangunan, Ibnu Khaldun	Pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia.	Mendukung pembahasan pembangunan ekonomi dan relevansi pemikiran Khaldun dalam konteks Indonesia.

No. Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Konsep/Variabel Utama	Temuan/Relevansi Utama	Relevansi dengan Pembahasan
10 Hania (2021)	Pendidikan Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd	Pendidikan, rasionalitas, abad ke-21	Pemikiran pendidikan Ibnu Rusyd dapat direlevansikan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.	Mendukung pembahasan pendidikan, kemampuan berpikir, dan relevansi kontemporer.
11 Haoua (2025)	Transmisi warisan intelektual Arab-Islam ke Eropa	Andalusia, transmisi ilmu, warisan intelektual	Kota-kota Andalusia berperan dalam transmisi warisan intelektual Arab-Islam ke Eropa.	Mendukung konteks historis pemikiran Ibnu Rusyd dan perkembangan intelektual Islam.
12 Ikhsan & Ramadhan (2023)	Etika pendidikan Ibnu Rusyd	Etika, pendidikan, rasionalitas	Pemikiran Ibnu Rusyd mengenai pendidikan memiliki dimensi etis yang relevan dengan kehidupan pendidikan kontemporer.	Mendukung pembahasan integrasi pengetahuan, rasionalitas, dan etika.
13 Kadir (2025)	Integrasi pemikiran Khaldun dalam analisis sosial	Sosiologi Islam, masyarakat, perubahan sosial	Pemikiran Khaldun dapat digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis dinamika sosial kontemporer.	Mendukung pembahasan teori Khaldunian sebagai kerangka interpretatif.
14 Kusuma et al. (2024)	Pembangunan ekonomi dan budaya Indonesia	Ekonomi, budaya, pembangunan	Pemikiran Ibnu Khaldun dapat direlevansikan dengan persoalan pembangunan ekonomi dan budaya Indonesia.	Mendukung pembahasan pembangunan ekonomi, produktivitas, dan kondisi sosial masyarakat.
15 Lalahwa et al. (2024)	Hubungan agama dan akal dalam pemikiran Ibnu Rusyd	Agama, akal, rasionalitas	Ibnu Rusyd memberikan perhatian penting terhadap relasi agama dan akal dalam tradisi filsafat Islam.	Mendukung pembahasan rasionalitas dan integrasi akal dalam kehidupan sosial-politik.
16 Lucas (2024)	Perkembangan ilmu-ilmu Islam	Sejarah intelektual, ilmu Islam, kritik narasi klasik	Perkembangan ilmu Islam perlu dibaca secara lebih kompleks dan tidak semata-mata melalui narasi kemunduran setelah periode klasik.	Mendukung argumen menghindari penyederhanaan dan anakronisme dalam membaca pemikiran Islam klasik.
17 Mardiana et al. (2025)	Ekonomi digital dan peran negara	Ekonomi digital, negara, kesejahteraan	Pemikiran Khaldun dapat direfleksikan dalam pembahasan ekonomi digital dan peran negara dalam kesejahteraan.	Mendukung pembahasan relevansi pemikiran Khaldun terhadap pembangunan ekonomi kontemporer.

No. Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Konsep/Variabel Utama	Temuan/Relevansi Utama	Relevansi dengan Pembahasan
18 Marjuan et al. (2025)	<i>Ashabiyyah</i> dan <i>umran</i>	Solidaritas, peradaban, sosiologi Islam	<i>Ashabiyyah</i> dan <i>umran</i> merupakan fondasi penting dalam memahami pembentukan dan perkembangan masyarakat dalam pemikiran Khaldun.	Sangat relevan untuk solidaritas sosial, perubahan masyarakat, dan keteraturan sosial.
19 Martha (2025)	<i>Ashabiyyah</i> dalam hukum pidana dan kekerasan berbasis AI	<i>Ashabiyyah</i> , hukum, solidaritas, AI	Konsep <i>ashabiyyah</i> dapat direkontekstualisasikan untuk membaca persoalan sosial dan hukum kontemporer.	Mendukung argumen bahwa konsep Khaldunian dapat direlevansikan secara kritis tanpa diterapkan secara literal.
20 MR et al. (2025)	Positivisme dan pemikiran Ibnu Khaldun	Objektivitas, dinamika sosial, metodologi	Pemikiran Khaldun dapat dipertemukan secara kritis dengan pembahasan objektivitas dan dinamika sosial.	Mendukung penggunaan pemikiran Khaldun sebagai kerangka analisis sosial, bukan teori deterministik.
21 Nurfansyah et al. (2026)	<i>Ashabiyyah</i> dan etika keutamaan	Tradisi, solidaritas, etika sosial	<i>Ashabiyyah</i> dapat dibaca sebagai persoalan solidaritas dan tradisi dalam filsafat sosial, serta dibandingkan dengan etika keutamaan.	Sangat relevan untuk memperkuat pembahasan solidaritas, integrasi sosial, dan dimensi etis <i>ashabiyyah</i> .
22 Omar (2025)	Ibnu Rusyd dan kerangka pluralistik	Pluralisme, politik, Ibnu Rusyd	Pemikiran Ibnu Rusyd dapat ditempatkan dalam dialog dengan kerangka pluralistik dan pemikiran politik modern.	Mendukung pembahasan demokrasi/pluralisme sebagai kategori interpretatif, bukan identifikasi langsung dengan demokrasi modern.
23 Pratiwi (2023)	Model pembangunan Ibnu Khaldun	Pembangunan sosial-ekonomi, negara Muslim	Model pembangunan Khaldun dapat digunakan untuk memahami keterkaitan faktor ekonomi dan sosial dalam pembangunan negara Muslim.	Mendukung pembahasan pembangunan ekonomi dan hubungan produktivitas dengan kondisi sosial.
24 Prayogo et al. (2022)	Kritik Ibnu Rusyd terhadap filsafat keberadaan Tuhan	Rasionalitas, filsafat, teologi	Ibnu Rusyd menggunakan pendekatan filosofis dan rasional dalam membahas persoalan ketuhanan.	Mendukung pembahasan rasionalitas dalam tradisi pemikiran Ibnu Rusyd.

No. Penulis (Tahun)	Fokus Kajian	Konsep/Variabel Utama	Temuan/Relevansi Utama	Relevansi dengan Pembahasan
25 Riswan & Santalia (2025)	Rasionalitas dan wahyu dalam pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd	Akal, wahyu, rasionalitas	Perdebatan Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd menunjukkan pentingnya posisi rasionalitas dalam hubungan antara akal dan wahyu.	Mendukung pembahasan rasionalitas, kebajikan intelektual, dan pemikiran politik Ibnu Rusyd.
26 Sadr (2024)	Pluralisme demokratis	Demokrasi, pluralisme, partisipasi	Demokrasi pluralistik menekankan pentingnya keberagaman dan keterlibatan kelompok dalam kehidupan politik.	Menjadi referensi pendukung konseptual untuk menjelaskan demokrasi secara hati-hati dalam kaitannya dengan Ibnu Rusyd.
27 Said (2024)	Peradaban Abbasiyah melalui perspektif Khaldun	Peradaban, sejarah, <i>ashabiyah</i>	Pemikiran Khaldun dapat digunakan untuk membaca dinamika dan perkembangan peradaban dalam konteks historis.	Mendukung pembahasan perubahan sosial, peradaban, dan konteks historis pemikiran Khaldun.
28 Senturk (2024)	<i>Dā'irat al-Siyāsah</i> dalam pemikiran Khaldun	Politik, peradaban, kekuasaan	Pemikiran Khaldun dapat digunakan untuk meninjau persoalan politik modern melalui perspektif peradaban.	Mendukung pembahasan politik, kekuasaan, solidaritas, dan perspektif peradaban.
29 Sugara et al. (2026)	Relasi agama dan politik dalam filsafat Ibnu Rusyd	Agama, politik, Ibnu Rusyd	Hubungan agama dan politik merupakan bagian penting dalam pembacaan filsafat politik Ibnu Rusyd.	Sangat relevan untuk rasionalitas politik, agama, hukum, dan kehidupan politik.
30 Wahyudi (2023)	Hubungan akal dan wahyu dalam filsafat Ibnu Rusyd	Akal, wahyu, filsafat	Ibnu Rusyd menempatkan akal dan wahyu dalam hubungan yang dapat didialogkan melalui pendekatan filosofis.	Mendukung pembahasan rasionalitas sebagai fondasi pemikiran Ibnu Rusyd

Berdasarkan pemetaan tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari persoalan filsafat, politik, sosial, ekonomi, hingga pendidikan. Keragaman perspektif tersebut memungkinkan penelitian membangun pembacaan yang tidak bersifat parsial, karena setiap dimensi dapat ditempatkan dalam hubungan dengan dimensi lainnya. Literatur yang lebih baru juga menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh masih dapat didialogkan dengan persoalan kontemporer, tetapi proses tersebut tetap memerlukan pertimbangan terhadap konteks historis dan batas konseptual masing-masing pemikiran. Dengan demikian, matriks literatur ini menjadi dasar untuk mengembangkan sintesis yang menempatkan solidaritas sosial, rasionalitas, kekuasaan, pembangunan, dan pendidikan sebagai dimensi yang saling berhubungan, bukan sebagai gagasan yang berdiri sendiri.

Untuk memperjelas hubungan konseptual antara pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun, diperlukan pemetaan terhadap unsur-unsur yang membentuk keteraturan kehidupan bersama. Kedua pemikir berangkat dari perhatian yang berbeda terhadap manusia dan masyarakat, sehingga perbandingannya perlu dilakukan dengan mempertahankan karakter pemikiran masing-masing. Sintesis dilakukan bukan untuk menyamakan kedua gagasan, melainkan untuk menemukan titik temu yang dapat menjelaskan persoalan sosial dan politik secara lebih komprehensif. Tabel berikut menyajikan hasil pemetaan tersebut sebagai dasar untuk memahami hubungan antara dimensi intelektual, sosial, dan moral dalam kehidupan publik.

Tabel 2. Hasil Sintesis Solidaritas Sosial dan Moralitas Politik

Dimensi	Ibnu Rusyd	Ibnu Khaldun	Hasil Sintesis
Fokus	Rasionalitas dan kebajikan	Solidaritas sosial	Keteraturan membutuhkan rasionalitas dan solidaritas
Sumber keteraturan	Akal, kebajikan, dan keadilan	<i>Ashabiyah</i>	Solidaritas perlu diarahkan pada kepentingan umum
Risiko kemunduran	Hilangnya orientasi kebajikan	Pelemahan solidaritas	Kepentingan partikular dapat melemahkan kehidupan publik
Penguatan	Pendidikan dan rasionalitas	Kohesi sosial	Pendidikan dan solidaritas menjadi dua unsur komplementer

Sumber: Hasil sintesis literatur, 2026.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa keteraturan masyarakat tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi pemikiran. Kehidupan publik membutuhkan perpaduan antara kualitas pertimbangan manusia dan kemampuan masyarakat membangun hubungan yang saling menopang. Perspektif tersebut juga memperlihatkan bahwa kemunduran sosial dapat muncul ketika orientasi bersama melemah dan kepentingan tertentu mulai menggeser tujuan kolektif. Oleh sebab itu, sintesis kedua pemikiran memberikan landasan untuk melihat pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan hubungan sosial sebagai proses yang saling berkaitan dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Pembahasan mengenai kehidupan politik perlu mempertimbangkan hubungan antara gagasan normatif dan kondisi sosial yang memungkinkan suatu tatanan politik berlangsung. Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun menawarkan titik berangkat yang berbeda, tetapi keduanya dapat dipertemukan melalui perhatian terhadap hubungan antara manusia, masyarakat, dan pemerintahan. Perbandingan ini juga penting untuk menghindari penyamaan konsep politik klasik dengan terminologi politik modern secara langsung. Oleh karena itu, sintesis berikut digunakan untuk melihat sejauh mana gagasan kedua pemikir dapat memberikan kerangka interpretatif bagi persoalan politik kontemporer.

Tabel 3. Hasil Sintesis Pemikiran Politik

Elemen	Ibnu Rusyd	Ibnu Khaldun	Hasil Sintesis
Dasar kehidupan politik	Rasionalitas dan kebajikan	Solidaritas sosial	Politik membutuhkan basis moral dan sosial
Keadilan	Prinsip keteraturan kehidupan bersama	Penopang keberlangsungan negara	Keadilan berperan dalam legitimasi

Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora

 <https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v1i2.14457>

Elemen	Ibnu Rusyd	Ibnu Khaldun	Hasil Sintesis
Masyarakat	Kapasitas rasional manusia	Kekuatan kelompok	Kualitas masyarakat memengaruhi kualitas pemerintahan
Demokrasi	Relevan sebagai rekonstruksi konseptual	Tidak dirumuskan sebagai demokrasi modern	Keduanya memberi perangkat untuk membaca prasyarat kehidupan demokratis

Sumber: Hasil sintesis literatur, 2026.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pemikiran politik klasik dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami kualitas suatu tatanan pemerintahan. Relevansinya tidak terutama terletak pada pencarian kesamaan istilah dengan sistem politik masa kini, tetapi pada prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan kekuasaan. Pendekatan tersebut memungkinkan demokrasi dibaca secara lebih kritis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kualitas manusia yang berada di dalamnya. Dengan demikian, sintesis kedua pemikir dapat memperkaya analisis politik kontemporer tanpa menghilangkan perbedaan konteks sejarah dan konseptual yang melekat pada masing-masing pemikiran.

Pembahasan mengenai dinamika kekuasaan dan kelembagaan perlu ditempatkan dalam kerangka yang melihat negara bukan sekadar sebagai struktur formal, tetapi sebagai bagian dari proses sosial yang terus berkembang. Keberlangsungan suatu pemerintahan berkaitan dengan kualitas hubungan antara penguasa, masyarakat, dan aturan yang mengatur kehidupan bersama. Perspektif Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun dapat dipertemukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang menopang keberlangsungan tatanan politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sintesis literatur berikut digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara kondisi sosial, kualitas kekuasaan, dan keberadaan kelembagaan.

Tabel 4. Hasil Sintesis Dinamika Kekuasaan dan Kelembagaan

Dimensi	Temuan Ibnu Rusyd	Temuan Ibnu Khaldun	Sintesis
Sumber stabilitas	Rasionalitas dan kebajikan	<i>Ashabiyah</i>	Stabilitas membutuhkan basis moral dan sosial
Risiko kemunduran	Pelemahan kebajikan politik	Pelemahan solidaritas	Kualitas aktor dan hubungan sosial memengaruhi institusi
Kekuasaan	Perlu diarahkan oleh kebajikan	Mengalami perubahan seiring perubahan solidaritas	Kekuasaan membutuhkan mekanisme pengendalian
Institusi	Memerlukan keteraturan dan keadilan	Dipengaruhi dinamika sosial-politik	Institusi tidak terlepas dari kondisi masyarakat

Sumber: Hasil sintesis literatur, 2026.

Hasil sintesis memberikan gambaran bahwa keberlanjutan pemerintahan tidak hanya bergantung pada keberadaan struktur kelembagaan secara formal. Hubungan antara perilaku aktor, kondisi masyarakat, dan mekanisme pengelolaan kekuasaan menjadi bagian penting

dalam menentukan kemampuan institusi menghadapi perubahan. Perspektif ini juga menunjukkan bahwa kelembagaan perlu dipahami sebagai sesuatu yang berkembang bersama lingkungan sosial dan politiknya, bukan sebagai sistem yang sepenuhnya berdiri sendiri. Dengan demikian, pemikiran kedua tokoh dapat digunakan sebagai landasan interpretatif untuk menilai ketahanan pemerintahan sekaligus memahami mengapa perubahan sosial dapat memengaruhi kualitas dan keberlangsungan institusi.

Pembahasan pembangunan ekonomi dalam perspektif pemikiran klasik perlu memperhatikan keterkaitan antara aktivitas ekonomi, peran pemerintah, dan tujuan kehidupan bersama. Pendekatan tersebut memungkinkan pembangunan dipahami secara lebih luas daripada sekadar pencapaian pertumbuhan ekonomi atau peningkatan produksi. Pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun memberikan sudut pandang yang berbeda dalam melihat hubungan antara manusia, negara, dan aktivitas ekonomi, tetapi keduanya dapat dipertemukan dalam kerangka analisis yang saling melengkapi. Oleh karena itu, sintesis berikut disusun untuk memperlihatkan bagaimana gagasan kedua tokoh dapat direlevansikan secara kritis dengan persoalan pembangunan ekonomi kontemporer.

Tabel 5. Hasil Sintesis Pembangunan Ekonomi

Dimensi	Ibnu Rusyd	Ibnu Khaldun	Hasil Sintesis
Orientasi	Rasionalitas dan keadilan	Produktivitas dan kemakmuran	Pembangunan membutuhkan efisiensi dan keadilan
Negara	Pengaturan berdasarkan pertimbangan rasional	Kebijakan memengaruhi aktivitas ekonomi	Kebijakan publik perlu mempertimbangkan insentif ekonomi
Fiskal	Keadilan sebagai prinsip	Hubungan pajak dan aktivitas ekonomi	Fiskal perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan produktivitas
Pembangunan	Kepentingan kehidupan bersama	Produktivitas masyarakat	Pertumbuhan perlu disertai kesejahteraan publik

Sumber: Hasil sintesis literatur, 2026.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan pertimbangan ekonomi sekaligus tujuan sosial yang lebih luas. Perspektif tersebut menempatkan kebijakan pemerintah sebagai salah satu faktor yang perlu dinilai berdasarkan konsekuensinya terhadap perilaku ekonomi dan kondisi masyarakat. Dengan pendekatan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. Sintesis ini memberikan dasar konseptual untuk melihat hubungan antara kebijakan, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan publik secara lebih seimbang tanpa mengklaim bahwa pemikiran kedua tokoh merupakan teori pembangunan modern secara langsung.

Pendidikan dalam perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Rusyd dapat dipahami sebagai bagian penting dari proses pembentukan manusia yang mampu berperan dalam kehidupan

sosial. Kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian intelektual, tetapi juga dengan proses pengembangan kapasitas manusia secara menyeluruh. Perbedaan penekanan antara keduanya justru membuka ruang untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan dan proses pendidikan. Sintesis kedua perspektif tersebut digunakan untuk melihat keterkaitan antara pengembangan kemampuan, pembentukan nalar, pengalaman belajar, serta nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan bersama. Ringkasan hubungan antardimensi tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Sintesis Pendidikan

Dimensi	Ibnu Khaldun	Ibnu Rusyd	Hasil Sintesis
Tujuan	Pembentukan kecakapan	Pengembangan rasionalitas	Kompetensi dan nalar perlu dikembangkan bersama
Metode	Bertahap dan berulang	Argumentatif	Pembelajaran perlu adaptif dan kontekstual
Pengetahuan	Penguasaan melalui pengalaman	Pemahaman melalui argumentasi	Pengetahuan perlu bersifat aplikatif dan kritis
Etika	Pembentukan kemampuan sosial	Kebajikan dan rasionalitas	Pendidikan perlu mengintegrasikan kompetensi dan etika

Sumber: Hasil sintesis literatur, 2026.

Berdasarkan sintesis tersebut, pendidikan dapat dipandang sebagai proses yang menghubungkan kapasitas intelektual dengan kesiapan individu menghadapi kehidupan sosial. Perbedaan orientasi antara pengalaman dan argumentasi tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya dapat saling melengkapi dalam membentuk proses belajar yang lebih utuh. Perspektif tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup dinilai dari penguasaan pengetahuan, tetapi perlu dilihat dari kemampuan peserta didik menggunakan pengetahuan secara tepat dalam berbagai situasi. Selain itu, dimensi etika memberikan arah agar kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan digunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, sintesis pemikiran kedua tokoh memberikan dasar konseptual bagi pendidikan yang memadukan kemampuan praktis, penalaran kritis, pengalaman belajar, dan tanggung jawab sosial tanpa mengklaim bahwa keduanya telah merumuskan sistem pendidikan modern secara eksplisit.

Sintesis pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun menunjukkan adanya peluang untuk membangun kerangka konseptual yang menghubungkan aspek sosial, politik, kelembagaan, ekonomi, dan pendidikan. Kedua pemikir memiliki titik tekan yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut dapat dipertemukan pada perhatian terhadap kualitas manusia dan kehidupan bersama. Integrasi kedua perspektif tidak dimaksudkan untuk menyamakan konsep yang lahir dari konteks historis berbeda, melainkan untuk menemukan hubungan konseptual yang dapat digunakan dalam membaca persoalan masyarakat secara lebih menyeluruh. Kerangka tersebut menempatkan rasionalitas, solidaritas, keadilan, produktivitas, dan pembentukan kapasitas manusia sebagai unsur yang saling berhubungan. Hasil sintesis integratif tersebut dirangkum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Model Sintesis Integratif Ibnu Rusyd–Ibnu Khaldun

Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora

 <https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v1i2.14457>

Dimensi	Ibnu Rusyd	Ibnu Khaldun	Sintesis
Sosial-politik	Rasionalitas dan kebajikan	<i>Ashabiyah</i>	Solidaritas inklusif berbasis rasionalitas
Kelembagaan	Keadilan dan keteraturan	Dinamika kekuasaan	Institusi membutuhkan legitimasi dan pengendalian kekuasaan
Ekonomi	Rasionalitas dan keadilan	Produktivitas dan fiskal	Pembangunan menggabungkan produktivitas dan keadilan
Pendidikan	Nalar dan argumentasi	<i>Malakah</i> dan latihan	Pendidikan berbasis kompetensi, nalar, dan etika

Sumber: Hasil sintesis konseptual penelitian, 2026.

Model sintesis tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun dapat dibangun melalui prinsip saling melengkapi, bukan melalui penyamaan konsep secara langsung. Pada tingkat sosial-politik, rasionalitas dapat memberikan arah normatif bagi solidaritas, sedangkan dinamika sosial menjelaskan kondisi yang memungkinkan nilai tersebut bertahan dalam kehidupan masyarakat. Pada ranah kelembagaan dan ekonomi, dimensi normatif perlu berjalan bersama dengan pemahaman terhadap mekanisme sosial dan material yang menopang keberlangsungannya. Sementara itu, pendidikan menjadi fondasi yang menghubungkan pembentukan kemampuan individu dengan kualitas kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, model Rusydian–Khaldunian dapat diposisikan sebagai kerangka interpretatif yang menghubungkan nalar, solidaritas, keadilan, kelembagaan, produktivitas, dan pendidikan dalam satu perspektif integratif untuk membaca persoalan masyarakat kontemporer.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *ashabiyah* dan rasionalitas dapat dipahami sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam menjelaskan keteraturan kehidupan sosial. *Ashabiyah* memberikan basis solidaritas yang memungkinkan individu membangun ikatan, kerja sama, dan rasa memiliki terhadap kelompok sosial, sedangkan rasionalitas berfungsi memberikan arah agar hubungan tersebut tidak berkembang menjadi loyalitas yang eksklusif. Bahri dan Musa (2022) menjelaskan bahwa konsep *ashabiyah* Ibnu Khaldun berkaitan dengan solidaritas yang menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial, sedangkan Kadir (2025) menunjukkan bahwa pemikiran Khaldun masih relevan digunakan untuk membaca dinamika sosial kontemporer. Dari perspektif Ibnu Rusyd, hubungan antara akal dan kehidupan manusia memperoleh posisi penting karena rasionalitas memungkinkan manusia mempertimbangkan persoalan secara argumentatif dan tidak semata-mata berdasarkan dorongan kepentingan kelompok (Wahyudi, 2023; Lalahwa et al., 2024). Dengan demikian, sintesis kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa solidaritas membutuhkan orientasi rasional agar tetap inklusif, sementara rasionalitas membutuhkan lingkungan sosial yang memungkinkan nilai-nilai kebajikan diwujudkan dalam kehidupan bersama.

Pemikiran politik Ibnu Rusyd juga perlu ditempatkan secara proporsional ketika direlevansikan dengan gagasan demokrasi kontemporer. Sugara et al. (2026) memperlihatkan bahwa hubungan agama dan politik dalam filsafat Ibnu Rusyd dapat menjadi ruang untuk memahami hubungan antara prinsip keagamaan, pertimbangan rasional, dan kehidupan politik. Sementara itu, Sadr (2024) menunjukkan bahwa demokrasi pluralistik membutuhkan pengakuan terhadap keberagaman dan partisipasi yang lebih substantif, sehingga dapat menjadi perspektif pembanding ketika gagasan politik klasik dibaca dalam konteks masa kini. Atas dasar tersebut, demokrasi dalam penelitian ini lebih tepat digunakan sebagai kategori interpretatif

untuk membaca relevansi gagasan tentang rasionalitas, hukum, kebajikan, dan kehidupan politik, bukan sebagai bukti bahwa Ibnu Rusyd telah merumuskan sistem demokrasi modern secara utuh. Pendekatan tersebut penting untuk menghindari anakronisme karena gagasan politik abad pertengahan memiliki konteks kelembagaan dan historis yang berbeda dari demokrasi konstitusional masa kini. Dengan cara demikian, relevansi pemikiran Rusyd tidak terletak pada kesamaan bentuk institusinya, melainkan pada kemungkinan dialog konseptual antara rasionalitas politik klasik dan persoalan politik kontemporer.

Dinamika kekuasaan dalam pemikiran Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa keberlangsungan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang menopang kekuasaan tersebut. Marjuan et al. (2025) menempatkan *asabiyyah* dan *umran* sebagai fondasi penting dalam sosiologi Islam Ibnu Khaldun, sehingga perubahan politik dapat dipahami bersama dengan perubahan struktur sosial dan solidaritas masyarakat. MR et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dapat dibaca melalui hubungan antara objektivitas, dinamika sosial, dan proses perubahan masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kualitas kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh figur atau pergantian pemimpin, tetapi juga oleh kekuatan solidaritas, legitimasi sosial, dan kemampuan institusi mempertahankan keteraturan. Namun, teori perubahan sosial Ibnu Khaldun tidak sebaiknya diperlakukan sebagai formula deterministik yang secara otomatis menjelaskan setiap kemunduran negara modern, karena kondisi ekonomi, teknologi, hukum, dan kelembagaan setiap masyarakat berbeda. Dalam konteks tersebut, teori Khaldunian lebih tepat digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk membaca hubungan antara masyarakat, kekuasaan, solidaritas, dan perubahan sosial, sedangkan pemikiran Rusyd memberikan dimensi tambahan melalui penekanan pada akal dan pertimbangan rasional (Wahyudi, 2023).

Dalam aspek pembangunan ekonomi, relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dapat dibaca melalui hubungan antara kondisi masyarakat, aktivitas produktif, dan keberlangsungan tatanan sosial. Kadir (2025) menunjukkan bahwa pemikiran Khaldun tetap dapat digunakan dalam analisis sosial kontemporer, sedangkan Marjuan et al. (2025) menegaskan keterkaitan *asabiyyah* dan *umran* sebagai fondasi dalam memahami kehidupan masyarakat. Perspektif tersebut memungkinkan pembangunan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan output ekonomi, tetapi juga sebagai proses yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat, hubungan sosial, dan keberlanjutan tatanan kehidupan bersama. Oleh karena itu, penerapan pemikiran Khaldun dalam konteks ekonomi kontemporer sebaiknya tidak dilakukan dengan memindahkan konsep ekonomi abad pertengahan secara literal, melainkan dengan mengadaptasi prinsip hubungan antara produktivitas masyarakat, kondisi sosial, dan kualitas tata kelola. Ketika dipertemukan dengan pemikiran Ibnu Rusyd, dimensi ekonomi tersebut dapat diperluas melalui perhatian terhadap rasionalitas dan pertimbangan etis dalam mengelola kepentingan publik. Sintesis ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan tidak cukup dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas hubungan sosial, rasionalitas kebijakan, dan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Pada bidang pendidikan, penelitian menemukan adanya titik temu antara pembentukan kecakapan dalam pemikiran Ibnu Khaldun dan pengembangan rasionalitas dalam pemikiran Ibnu Rusyd. Abror (2021) menunjukkan bahwa pemikiran pendidikan Ibnu Rusyd masih dapat direlevansikan dengan persoalan pendidikan kontemporer, sedangkan Hania (2021) menempatkan pemikiran Ibnu Rusyd dalam pembahasan pendidikan abad ke-21. Ikhsan dan Ramadhan (2023) juga menegaskan pentingnya dimensi etika dalam pemikiran pendidikan Ibnu Rusyd, sehingga pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan

dalam perspektif kedua tokoh dapat dipahami sebagai proses pengembangan kapasitas manusia yang menghubungkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan pembentukan etika. Namun, relevansi terhadap konsep kontemporer seperti *human capital*, berpikir kritis, atau pembelajaran berdiferensiasi merupakan hasil interpretasi penelitian dan tidak dapat diklaim sebagai konsep yang secara eksplisit dirumuskan oleh Ibnu Khaldun atau Ibnu Rusyd. Lalahwa et al. (2024) memperkuat pentingnya hubungan antara agama dan rasio dalam pemikiran Ibnu Rusyd, sehingga integrasi antara kemampuan intelektual dan orientasi nilai dapat dipandang sebagai prinsip yang relevan untuk pengembangan pendidikan masa kini.

Secara keseluruhan, sintesis penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Rusydian–Khaldunian memiliki kekuatan pada kemampuannya mempertemukan dimensi rasional-normatif dengan kondisi sosial yang membentuk kehidupan masyarakat. Ibnu Rusyd memberikan landasan untuk memahami kedudukan akal, hubungan antara agama dan rasio, serta pentingnya pertimbangan intelektual dalam kehidupan manusia (Wahyudi, 2023; Lalahwa et al., 2024), sedangkan Ibnu Khaldun menyediakan kerangka untuk memahami solidaritas, *umran*, dinamika sosial, dan perubahan masyarakat (Bahri & Musa, 2022; Kadir, 2025; Marjuan et al., 2025). Keterhubungan kedua perspektif tersebut tidak berarti bahwa pemikiran Islam klasik identik dengan teori sosial-politik modern, tetapi menunjukkan adanya ruang dialog konseptual yang dapat digunakan untuk membaca persoalan kontemporer. Bahkan, perkembangan kajian mengenai hubungan agama, politik, rasionalitas, dan solidaritas menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh masih dapat dikaji secara produktif tanpa menghilangkan konteks historisnya (Sugara et al., 2026; Nurfansyah et al., 2026). Dengan demikian, kontribusi utama sintesis ini terletak pada penyusunan kerangka dialog yang menghubungkan solidaritas sosial, rasionalitas politik, kualitas kelembagaan, pembangunan, dan pendidikan, sekaligus mempertahankan batas antara gagasan asli kedua tokoh dan interpretasi kontemporer peneliti.

KESIMPULAN

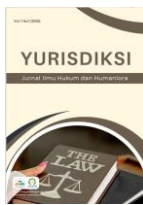
Penelitian ini menunjukkan bahwa sintesis antara pendekatan empiris-sosiologis Ibnu Khaldun dan pendekatan rasional-konstitusional Ibnu Rusyd menghasilkan suatu kerangka konseptual yang saling melengkapi dalam memahami dinamika sosial, politik, kelembagaan, dan pembangunan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa konsep *ashabiyah* berperan sebagai fondasi kohesi sosial dan ketahanan institusi, sedangkan konsep *as-siyasah al-jamiah* menempatkan rasionalitas, supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan keadilan sebagai unsur penting dalam tata kelola pemerintahan. Sintesis tersebut menjadi kontribusi ilmiah (*novelty*) penelitian karena mengintegrasikan dua tradisi pemikiran Islam klasik yang selama ini lebih sering dikaji secara terpisah, sehingga memberikan perspektif baru dalam kajian filsafat politik dan sosiologi Islam. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh masih memiliki relevansi konseptual untuk menganalisis berbagai persoalan kontemporer, seperti polarisasi sosial, kualitas demokrasi, tata kelola kelembagaan, dan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa sintesis pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Rusyd berpotensi menjadi landasan konseptual dalam pengembangan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi sosial, politik, ekonomi, serta etika. Hasil penelitian juga mengindikasikan pentingnya pengembangan model analisis yang menghubungkan modal sosial, kualitas kelembagaan, dan nilai-nilai moral dalam merespons tantangan pembangunan kontemporer. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka konseptual ini melalui studi empiris maupun komparatif

pada berbagai konteks sosial dan politik sehingga relevansi serta aplikasinya dapat dievaluasi secara lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran Islam klasik, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kajian filsafat politik dan sosiologi Islam dalam konteks kontemporer.

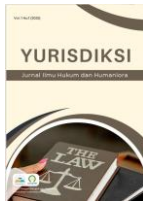
DAFTAR PUSTAKA

- Abror, A. (2021). Pemikiran Ibnu Rusyd tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Dunia Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i2.4802>
- Al Hafied, L. I., & Nurmayanti, E. (2025). Paradigma Dan Rasionalitas: Telaah Kritis Pemikiran Thomas Kuhn Dan Ibnu Rusyd. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1450-1462. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.266>
- Alibašić, H. (2025). Administrative Legacy of Ibn Khaldūn. A Comparative Study of Historical Influences in Contemporary Governance Practices. *Institutiones Administrationis–Journal of Administrative Sciences*, 5(1), 25-49. <https://doi.org/10.54201/iajas.142>
- Bacik, G. (2024). *Birth and Evolution of Islamic Political Theory: Political Rationalism from Ibn al-Muqaffa to Ibn Khaldun*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9781399522038>
- Bahri, H. S. S., & Musa, R. (2022). [The Concept of Asabiyah According to Ibn Khaldun] Konsep Asabiyah menurut Ibnu Khaldun. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 23(1), 145-156. <https://doi.org/10.37231/jimk.2022.23.1.656>
- Demirel, D. (2024). Sociological and political origins in Ibn Khaldun's state theory. *Sociology Lens*, 37(3), 468-479. <https://doi.org/10.1111/johs.12473>
- Emy, D. (2024). Konsep Kerakyatan Dalam Filsafat Politik Ibnu Rusyd (Studi Kasus Di Desa Kadibolo Klaten). *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v6i1.17700>
- GÖKÇE, A. F., Muhammed, A. K. S. U., & Fatsa, N. (2025). Political Philosophy Of Ibn Rushd. *ULUSLARARASI AKADEMİK BİRİKİM DERGİSİ*, 8(2). <https://akademikbirikimdergisi.com/index.php/uabd/article/view/339>
- Gusfira, A., Bunaia, A., Sinka, V., & Zein, A. W. (2024). Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4), 295-301. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.391>
- Hania, I. (2021). Pendidikan Perspektif Al-Ghazali dan Ibn Rusyd Serta Relevansinya di Abad 21. *Heutagogia: Journal of Islamic Education*, 1(2), 241-251. <https://doi.org/10.14421/hjie.2021.12-10>
- Haoua, F. (2025). The impact of Andalusian cities on the transmission of translated Arab-Islamic heritage to Europe during the Middle Ages (Córdoba and Toledo as models). 143-127. *مجلة التاريخ المتوسطي*, 7(1). <https://asjp.cerist.dz/en/article/272139>
- Ikhsan, A. M., & Ramadhan, M. F. (2023). Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Etika Pendidikan dan Relevansinya di Era Milenial. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.58577/dimar.v5i1.95>
- Kadir, S. (2025). Integration of Ibn Khaldun's thought in contemporary social analysis, perspectives of Islamic sociology. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(1), 432-437. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.6986>



- Kusuma, N. R., Janwari, Y., Jubaedah, D., & Maulana, F. A. (2024). Actualization of Indonesian Economic and Cultural Development Reviewed from Ibn Khaldun's Thoughts. *Mimbar Agama Budaya*, 41(1), 95-108. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v41i1.38872>
- Lalahwa, I. F., Gunawan, A., & Muhajir, M. (2024). The relationship between religion and reason in the context of Islamic education philosophy from the perspective of Ibn Rushd and Ibn Taimiyah. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 111-119. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i2.1432>
- Lucas, A. (2024). Re-Evaluating the Development of the Islamic Sciences: The Case Against the Classical Narrative and the Myth of Decline. *Unisia*, 42(1). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol42.iss1.art3>
- Mardiana, A., Ningsih, N. F., Amelia, N. D., Kasvi, D. A., Chairunnisah, C., & Maulana, M. R. (2025). Perekonomian Digital dan Peran Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan: Refleksi Pemikiran Ibn Khaldun di Era Modern. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 295-305. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).21005](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).21005)
- Marjuan, M., Nur, M., & Sugiyono, S. (2025). Asabiyyah Dan Umran: Fondasi Sosiologi Islam Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Basataka (JBT)*, 8(2), 1544-1552. <https://doi.org/10.36277/basataka.v8i2.1125>
- Martha, A. E. (2025). Integrating Ibn Khaldun's Concept of Asabiyyah into Criminal Law to Address AI-Facilitated Violence Against Women. *Unisia*, 43(2). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol43.iss2.art17>
- MR, M. I. F., Anam, A. M., Wiratmoko, D., Yaacob, N. H., & Alwiyah, N. (2025). Positivism and Ibn Khaldun's thought: bridging objectivity and social dynamics. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 12(1), 26-36. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v12i1.83847>
- Nurfansyah, I., Firdaus, Q. A. H., & Hanafi, H. (2026). Tradisi dan Solidaritas sebagai Problem Filsafat Sosial: Aşabiyah Ibn Khaldūn dan Etika Keutamaan Alasdair MacIntyre. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 8(1), 25-48. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v8i1.51596>
- Omar, A. (2025). *The Pluralistic Frameworks of Ibn Rushd and Abdullahi Ahmed An-Na'im*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009386333>
- Pratiwi, I. E. (2023). Socioeconomic Development in Muslim Countries: Ibn Khaldun's Development Model-Based Approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 251-274. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1574>
- Prayogo, T. I., Nuriz, M. A. F., Setiawan, M. N. H., & Majid, M. K. (2022). Ibnu Rushd's Criticism of the Existence of God Philosophy. *Jurnal Ushuluddin*, 30(2), 155-168. <https://doi.org/10.24014/jush.v30i2.17738>
- Riswan, R., & Santalia, I. (2025). Kritik Al-Ghazali serta Pembelaan Ibnu Rusyd dalam Menyikapi Rasionalitas dan Wahyu. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 360-368. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17682919>
- Sadr, O. (2024). A case for democratic pluralism instead of democratic minimalism. *Frontiers in Political Science*, 6, 1442766. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1442766>
- Said, M. A. I. (2024). Memandang Peradaban Abbasiyah Menggunakan Pemikiran Ibnu Khaldun. *Historia Islamica: Journal of Islamic History and Civilization*, 3(1), 69-80. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/historia/article/view/1026>
- Senturk, R. (2024). Ibn Khaldūn and Kınalızāde's Concept of Dā'irat al-Siyāsah: A Rethinking of Modern Politics from A Civilisational Perspective. *Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 17(1), 1-21. <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol17no1.1>





- Sugara, R. R., Masykur, M., Gufron, I. A., & Wasehudin, W. (2026). The Relationship between Religion and Politics in Ibn Rushd's Philosophy. *Aqlania*, 17(1), 67-80. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v17i1.231>
- Wahyudi, K. (2023). Filsafat Ibnu Rusyd Hubungan Akal Dengan Wahyu. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, 1(2), 109-120. <https://doi.org/10.71025/2qny5z53>

